

PERAN DESENTRALISASI FISKAL DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI ERA PASCA-PANDEMI DI SUMATERA BARAT

Bella Kharisma Putri¹, Tomi Satria Maggara², Aldri Frinaldi³, Lince Magriasti⁴,
Hendranaldi⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Negeri Padang

E-mail : bellakharisma49@gmail.com¹, tommysatriamaggara@gmail.com²,
aldri@fis.unp.ac.id³, lincemagriasti@fis.unp.ac.id⁴, hendranaldi@fis.unp.ac.id⁵

ABSTRACT

This research aims to analyze the role of fiscal decentralization in improving the quality of post-pandemic public services in West Sumatra Province, especially in the health and education sectors. Using a descriptive qualitative approach, this research collects data through observation and document study, and examines the problem of regional dependence on central funds. The research results show that fiscal decentralization has a positive impact on increasing the accessibility of public services in urban areas. However, remote areas still experience obstacles in accessing health and education services due to limited infrastructure. In addition, regional budget allocations are still dominated by operational needs, so the portion for the essential public sector is relatively limited. Another factor influencing the effectiveness of fiscal decentralization is the high dependence on the Balancing Fund, with around 70% of regional budgets dependent on central fund transfers. This hampers fiscal independence and reduces the flexibility of local governments to respond quickly and innovatively to local needs. Based on these findings, fiscal decentralization in West Sumatra needs to be strengthened by increasing Original Regional Income (PAD) as well as more effective budget allocation in the main public service sectors. Increasing infrastructure capacity in remote areas is also a priority to reduce inequality of access. This research recommends a local economic development strategy to increase PAD, strengthen service facilities in remote areas, and reduce dependence on central funds. In this way, it is hoped that regional governments can be more independent and responsive in providing quality public services that are evenly distributed throughout the region.

Keywords: Fiscal Decentralization, Public Services, Post-Pandemic.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran desentralisasi fiskal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik pasca-pandemi di Provinsi Sumatera Barat, khususnya dalam sektor kesehatan dan pendidikan. Dengan pendekatan kualitatif deskriptif, penelitian ini mengumpulkan data melalui observasi dan studi dokumen, serta mengkaji permasalahan ketergantungan daerah pada dana pusat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa desentralisasi

fiskal berdampak positif pada peningkatan aksesibilitas pelayanan publik di daerah perkotaan. Namun, wilayah terpencil masih mengalami kendala dalam akses layanan kesehatan dan pendidikan karena keterbatasan infrastruktur. Selain itu, alokasi anggaran daerah masih didominasi oleh kebutuhan operasional, sehingga porsi untuk sektor publik esensial relatif terbatas. Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas desentralisasi fiskal adalah tingginya ketergantungan pada Dana Perimbangan, dengan sekitar 70% anggaran daerah bergantung pada transfer dana pusat. Hal ini menghambat kemandirian fiskal serta mengurangi fleksibilitas pemerintah daerah dalam merespons kebutuhan lokal dengan cepat dan inovatif. Berdasarkan temuan ini, desentralisasi fiskal di Sumatera Barat perlu diperkuat dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta alokasi anggaran yang lebih efektif pada sektor pelayanan publik utama. Peningkatan kapasitas infrastruktur di daerah terpencil juga menjadi prioritas untuk mengurangi ketimpangan akses. Penelitian ini merekomendasikan adanya strategi pengembangan ekonomi lokal untuk meningkatkan PAD, penguatan fasilitas pelayanan di daerah terpencil, dan pengurangan ketergantungan pada dana pusat. Dengan demikian, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih mandiri dan responsif dalam menyediakan pelayanan publik berkualitas yang merata di seluruh wilayah.

Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Pelayanan Publik, Pasca-Pandemi.

PENDAHULUAN

Pada era pasca-pandemi COVID-19, kebijakan desentralisasi fiskal menjadi salah satu instrumen penting dalam membangun kapasitas pemerintah daerah untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dan efektif. Desentralisasi fiskal memungkinkan daerah untuk mengelola sumber daya keuangan sesuai dengan kebutuhan lokal, yang berimplikasi pada peningkatan kemandirian daerah dan kemampuan untuk merespons kebutuhan masyarakat secara lebih cepat dan tepat. Namun, tantangan dalam implementasi desentralisasi fiskal masih dirasakan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Barat, yang menghadapi berbagai kendala dalam optimalisasi pelayanan publik di tengah keterbatasan anggaran dan ketergantungan pada transfer dana pusat.

Pandemi COVID-19 memperburuk permasalahan anggaran di tingkat daerah,

sehingga kualitas pelayanan publik di beberapa sektor strategis, seperti kesehatan dan pendidikan, mengalami penurunan. Sumatera Barat, misalnya, menghadapi tantangan dalam menyediakan layanan kesehatan yang memadai, terutama di wilayah terpencil yang sulit diakses. Data dari Kementerian Kesehatan (2023) menunjukkan bahwa hanya 52% fasilitas kesehatan di provinsi ini yang memiliki peralatan lengkap dan mampu menangani pasien dalam skala besar, termasuk dalam hal perawatan intensif. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan pelayanan yang signifikan antara daerah perkotaan dan pedesaan di Sumatera Barat.

Selain masalah aksesibilitas, pengelolaan anggaran daerah untuk pelayanan publik juga menjadi isu utama. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (2023), Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sumatera Barat hanya menyumbang sekitar 27% dari total pendapatan daerah, sementara

sisanya bergantung pada dana transfer dari pusat, seperti Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Ketergantungan yang tinggi pada dana transfer ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kemandirian fiskal daerah. Hal ini berdampak pada fleksibilitas pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengimplementasikan kebijakan sesuai kebutuhan lokal, yang kemudian memengaruhi kualitas pelayanan publik.

Desentralisasi fiskal di Indonesia, yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebenarnya bertujuan untuk memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah, termasuk dalam hal keuangan. Namun, di era pasca-pandemi ini, banyak daerah yang masih mengalami kesulitan dalam mengelola anggaran secara efektif karena terbatasnya PAD dan tingginya ketergantungan pada pusat. Sumatera Barat merupakan salah satu provinsi yang merasakan dampak ketergantungan ini, khususnya dalam aspek pembiayaan sektor kesehatan dan pendidikan, yang merupakan sektor-sektor vital untuk kesejahteraan masyarakat pasca-pandemi.

Ketimpangan anggaran untuk pelayanan publik juga terlihat pada belanja pemerintah daerah yang sering kali tidak tepat sasaran. Berdasarkan laporan Kementerian Dalam Negeri (2023), sekitar 40% dari belanja daerah di Sumatera Barat digunakan untuk keperluan operasional pemerintahan, sedangkan alokasi untuk sektor kesehatan dan pendidikan kurang dari 20%. Ketimpangan alokasi anggaran ini menimbulkan tantangan bagi pemerintah

daerah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, terutama di sektor-sektor yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Selain itu, kendala ini memperburuk ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Di samping itu, rendahnya kapasitas sumber daya manusia (SDM) di pemerintahan lokal menjadi tantangan tambahan dalam implementasi desentralisasi fiskal. Banyak pegawai pemerintah daerah di Sumatera Barat yang belum memiliki keterampilan memadai dalam pengelolaan keuangan daerah yang efisien dan efektif. Berdasarkan hasil survei Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (2023), sekitar 60% pegawai daerah di Sumatera Barat memerlukan pelatihan lebih lanjut dalam manajemen anggaran dan pengelolaan sumber daya. Hal ini menunjukkan bahwa kendala dalam peningkatan kualitas pelayanan publik bukan hanya terkait dengan aspek finansial, tetapi juga kemampuan SDM untuk mengelola dan mengoptimalkan anggaran yang ada.

Lebih jauh lagi, rendahnya PAD dan tingginya ketergantungan pada pusat turut menghambat upaya pemerintah daerah untuk berinovasi dalam meningkatkan pelayanan publik. Ketergantungan pada Dana Perimbangan membuat pemerintah daerah terbatas dalam membuat inisiatif atau program-program baru yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat lokal. Hal ini sejalan dengan temuan yang disampaikan oleh Bank Dunia (2022), yang menyatakan bahwa daerah-daerah di Indonesia yang bergantung pada dana transfer pusat cenderung memiliki keterbatasan dalam

melakukan inovasi pelayanan publik karena keterbatasan ruang fiskal. Kondisi ini membatasi efektivitas desentralisasi fiskal dalam mencapai tujuan akhirnya, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran desentralisasi fiskal dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik di era pasca-pandemi, dengan fokus pada Provinsi Sumatera Barat. Penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal dalam mendukung otonomi daerah serta dampaknya terhadap sektor-sektor pelayanan publik utama, terutama kesehatan dan pendidikan, di wilayah tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam mengimplementasikan desentralisasi fiskal serta memberikan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat kemandirian fiskal dan kualitas pelayanan publik di tingkat lokal

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami dan mendeskripsikan fenomena desentralisasi fiskal serta dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat. Pendekatan kualitatif ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam konteks permasalahan yang terjadi, termasuk faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan anggaran dan implementasi pelayanan publik di tingkat lokal. Dengan demikian, metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif terkait dinamika

kebijakan desentralisasi fiskal di era pasca-pandemi.

Teknik analisis dalam penelitian ini melibatkan observasi dan studi dokumen. Observasi dilakukan untuk memperoleh pemahaman langsung mengenai praktik-praktik pelayanan publik di daerah yang menjadi lokasi penelitian, khususnya terkait bagaimana anggaran daerah dialokasikan dan digunakan dalam sektor-sektor strategis, seperti kesehatan dan pendidikan. Sementara itu, studi dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, termasuk laporan pemerintah, data statistik, dan kebijakan terkait desentralisasi fiskal, sehingga memungkinkan peneliti untuk melakukan analisis yang lebih mendalam dan terstruktur.

Proses analisis data dalam penelitian ini berfokus pada identifikasi permasalahan utama yang menghambat optimalisasi desentralisasi fiskal serta implikasinya terhadap kualitas pelayanan publik di tingkat lokal. Data yang diperoleh dari observasi dan studi dokumen kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola yang relevan dengan permasalahan penelitian. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran rinci mengenai efektivitas kebijakan desentralisasi fiskal dan rekomendasi yang tepat untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Peningkatan Akseibilitas Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan Di Sumatera Barat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan desentralisasi fiskal memiliki dampak positif dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik di sektor kesehatan dan pendidikan di Sumatera Barat, terutama di wilayah perkotaan. Otonomi yang diberikan kepada pemerintah daerah memudahkan alokasi anggaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat lokal, sehingga akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan di perkotaan mengalami peningkatan yang signifikan. Langkah ini memperlihatkan bagaimana desentralisasi fiskal dapat membantu daerah-daerah yang lebih padat dalam memperbaiki layanan publik secara lebih cepat dan tepat.

Namun, di wilayah-wilayah terpencil dan pedesaan, aksesibilitas pelayanan publik masih menjadi tantangan besar. Penelitian ini menemukan bahwa keterbatasan infrastruktur, seperti jalan, fasilitas kesehatan, dan sekolah, serta jumlah tenaga kesehatan dan pendidik yang kurang merata, menyebabkan ketimpangan akses di seluruh wilayah Sumatera Barat. Kondisi ini semakin diperburuk oleh distribusi sumber daya yang belum optimal, sehingga masyarakat di daerah terpencil masih sulit mendapatkan pelayanan dasar yang layak.

Temuan ini mengindikasikan bahwa otonomi fiskal yang diberikan kepada daerah masih perlu didukung dengan peningkatan kapasitas dan alokasi sumber daya yang lebih merata di tingkat lokal. Dengan adanya dukungan tambahan untuk memperbaiki infrastruktur dan menambah tenaga profesional di sektor kesehatan dan pendidikan, desentralisasi fiskal diharapkan dapat memberikan dampak yang lebih merata di seluruh wilayah Sumatera Barat, sehingga pelayanan publik tidak hanya meningkat di

perkotaan tetapi juga dapat diakses secara layak oleh masyarakat di daerah-daerah terpencil.

2. Efisiensi Pengelolaan Anggaran untuk Pelayanan Publik Utama

Dalam pengelolaan anggaran, penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi fiskal memberikan Sumatera Barat keleluasaan yang lebih besar dalam mengatur pengeluaran daerah. Meskipun demikian, hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran yang tersedia masih teralokasi pada kebutuhan operasional yang bersifat rutin. Hal ini mengakibatkan porsi yang relatif kecil dialokasikan untuk sektor-sektor layanan publik yang sangat vital, seperti kesehatan dan pendidikan. Kondisi ini menandakan adanya tantangan dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara efektif.

Selanjutnya, kendala dalam memaksimalkan efektivitas anggaran juga dipengaruhi oleh keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ketergantungan yang tinggi pada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Keterbatasan PAD mengurangi kemampuan pemerintah daerah untuk mengembangkan program-program inovatif dan responsif terhadap kebutuhan lokal. Ketergantungan pada dana transfer pusat membuat daerah cenderung mengandalkan alokasi yang telah ditetapkan, sehingga menghambat fleksibilitas dalam pengelolaan anggaran yang seharusnya dapat disesuaikan dengan prioritas lokal yang dinamis.

Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas desentralisasi fiskal di Sumatera Barat masih perlu ditingkatkan agar anggaran

publik dapat lebih optimal dalam memenuhi kebutuhan masyarakat lokal, terutama pasca-pandemi. Diperlukan strategi yang lebih baik dalam pengelolaan anggaran, termasuk peningkatan kapasitas daerah untuk meningkatkan PAD dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan dapat lebih responsif dan adaptif dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

3. Ketergantungan pada Dana Transfer Pusat dan Dampaknya pada Kemandirian Fiskal Daerah

Ketergantungan yang tinggi pada Dana Transfer Pusat, khususnya Dana Perimbangan, masih menjadi salah satu hambatan utama dalam meningkatkan kemandirian fiskal daerah di Sumatera Barat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sekitar 70% dari total anggaran di provinsi ini bersumber dari transfer dana pusat. Kondisi ini menciptakan situasi di mana pemerintah daerah kurang memiliki kebebasan untuk menentukan prioritas dan alokasi anggaran yang sesuai dengan kebutuhan spesifik masyarakat lokal, sehingga menghambat potensi daerah untuk mengembangkan program-program yang inovatif.

Lebih lanjut, ketergantungan pada dana pusat ini berdampak negatif terhadap fleksibilitas pemerintah daerah dalam pengelolaan anggaran. Ketidakpastian yang muncul akibat ketergantungan ini sering kali membuat daerah tidak mampu menyesuaikan anggaran dengan kondisi yang dinamis dan kebutuhan mendesak yang muncul. Akibatnya, program-program pelayanan publik yang direncanakan menjadi kurang responsif, sehingga kualitas pelayanan yang

diberikan kepada masyarakat tidak optimal dan tidak memenuhi harapan warga.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan kemandirian fiskal daerah, diperlukan strategi yang lebih efektif dalam diversifikasi sumber pendapatan dan pengelolaan anggaran. Pemerintah daerah harus berusaha untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui inovasi dalam pengumpulan pajak dan retribusi, serta menciptakan peluang ekonomi lokal. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan ketergantungan pada Dana Transfer Pusat dapat diminimalisasi, sehingga pemerintah daerah memiliki lebih banyak ruang untuk berinovasi dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik kepada masyarakat.

Pembahasan

1. Evaluasi Kualitas Pelayanan Publik Pasca-Pandemi

Evaluasi kualitas pelayanan publik pasca-pandemi sangat penting untuk memahami sejauh mana otonomi fiskal yang diberikan kepada daerah dapat meningkatkan layanan yang diterima oleh masyarakat. Dalam konteks desentralisasi fiskal, Sumatera Barat menghadapi tantangan besar dalam sektor-sektor utama seperti kesehatan, pendidikan, dan layanan sosial, yang semuanya terkena dampak signifikan akibat pandemi COVID-19. Penelitian ini menyoroti bahwa meskipun ada peningkatan dalam aksesibilitas layanan, masih terdapat ketimpangan yang mencolok antara daerah perkotaan dan pedesaan. Dengan kata lain, meskipun desentralisasi fiskal memberikan ruang bagi daerah untuk berinovasi, hasilnya belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam ketersediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan di daerah perkotaan, wilayah terpencil dan pedesaan masih menghadapi tantangan serius terkait akses dan kualitas layanan. Hal ini mencerminkan pentingnya evaluasi terhadap efektivitas anggaran yang dialokasikan dalam sektor-sektor ini. Ketidakmerataan dalam alokasi sumber daya menunjukkan bahwa meskipun ada keleluasaan dalam pengelolaan anggaran, ketergantungan pada dana transfer pusat dan keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi penghalang dalam mencapai kualitas pelayanan publik yang optimal.

Selain itu, evaluasi terhadap responsivitas dan efisiensi pelayanan publik juga mengungkapkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk meningkatkan kapasitas dan pelatihan bagi tenaga kesehatan dan pendidik di daerah. Penelitian ini menemukan bahwa banyak petugas kesehatan dan pendidik belum memiliki akses yang memadai terhadap pelatihan dan pengembangan profesional, yang berdampak pada kualitas layanan yang diberikan. Dengan mengidentifikasi masalah ini, penelitian ini memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di sektor publik, agar dapat lebih siap menghadapi tantangan yang ada, terutama di era pasca-pandemi.

Akhirnya, evaluasi kualitas pelayanan publik pasca-pandemi menunjukkan bahwa meskipun desentralisasi fiskal memiliki potensi untuk meningkatkan layanan publik, efektivitasnya sangat bergantung pada kebijakan yang tepat dan dukungan untuk pembangunan infrastruktur serta kapasitas daerah. Penelitian ini merekomendasikan

perlu strategi yang lebih terintegrasi untuk memastikan bahwa semua wilayah, terutama yang terpencil, dapat menikmati manfaat dari desentralisasi fiskal. Dengan pendekatan yang komprehensif, diharapkan Sumatera Barat dapat menciptakan sistem pelayanan publik yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat di masa depan.

2. Pengelolaan Anggaran Daerah dan Efektivitas Pengeluaran Publik

Pengelolaan anggaran daerah merupakan salah satu aspek kunci dalam desentralisasi fiskal yang memberikan kesempatan kepada daerah untuk menyesuaikan pengeluaran publik dengan kebutuhan masyarakat lokal. Di Provinsi Sumatera Barat, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat keleluasaan dalam pengelolaan anggaran, alokasi dana sering kali tidak mencerminkan prioritas yang mendesak, terutama dalam sektor-sektor yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar anggaran masih terfokus pada kebutuhan operasional, sementara porsi yang dialokasikan untuk sektor pelayanan publik seperti kesehatan dan pendidikan tetap rendah.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pengelolaan anggaran yang tidak optimal masih menjadi kendala dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Penelitian menemukan bahwa ketergantungan yang tinggi pada Dana Perimbangan, yang mencapai sekitar 70% dari total anggaran, membatasi kemampuan pemerintah daerah untuk berinovasi dalam pengeluaran publik. Hal ini menyebabkan pemerintah daerah

seringkali terjebak dalam rutinitas pengelolaan anggaran yang tidak fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, terutama dalam situasi pasca-pandemi yang memerlukan adaptasi cepat terhadap kondisi yang berubah.

Selanjutnya, evaluasi terhadap efektivitas pengeluaran publik di Sumatera Barat mengungkapkan bahwa ada kesenjangan dalam pengalokasian sumber daya untuk sektor-sektor penting. Meskipun ada beberapa upaya untuk meningkatkan anggaran bagi pelayanan kesehatan dan pendidikan, hasil penelitian menunjukkan bahwa masih ada banyak daerah, terutama yang terpencil, yang belum mendapatkan perhatian yang cukup dalam pengelolaan anggaran. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam kualitas layanan yang diterima oleh masyarakat di berbagai wilayah, yang seharusnya menjadi perhatian utama dalam rangka mencapai otonomi fiskal yang lebih baik.

Dalam konteks ini, diperlukan strategi yang lebih holistik untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan kapasitas dalam pengelolaan anggaran, serta diversifikasi sumber pendapatan daerah untuk mengurangi ketergantungan pada Dana Perimbangan. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan Provinsi Sumatera Barat dapat mengoptimalkan pengeluaran publik dan meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat, sehingga tujuan desentralisasi fiskal dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

3. Dampak Ketergantungan pada Dana Transfer Pusat terhadap Kemandirian Fiskal Daerah

Ketergantungan tinggi pada dana transfer dari pusat atau Dana Perimbangan telah lama menjadi tantangan bagi kemandirian fiskal daerah di Indonesia, termasuk di Provinsi Sumatera Barat. Dalam kerangka desentralisasi fiskal, seharusnya terdapat peningkatan kemandirian keuangan daerah untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya lokal dan respons terhadap kebutuhan masyarakat setempat. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sekitar 70% dari total anggaran daerah Sumatera Barat masih bergantung pada Dana Perimbangan. Ketergantungan ini menunjukkan adanya kendala bagi pemerintah daerah dalam menciptakan sumber pendapatan alternatif dan mengurangi ketergantungan pada dana pusat.

Akibatnya, ketergantungan yang berlebihan pada dana transfer pusat telah membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran secara fleksibel dan sesuai prioritas lokal. Pemerintah daerah menghadapi kesulitan dalam merancang kebijakan yang responsif dan inovatif, terutama dalam mengatasi permasalahan di sektor kesehatan dan pendidikan pasca-pandemi. Data penelitian mengungkapkan bahwa meskipun alokasi anggaran di Sumatera Barat lebih banyak pada operasional daripada layanan publik, fleksibilitas untuk berinovasi dalam pengelolaan dana tetap terhambat oleh ketergantungan pada dana pusat, yang seharusnya lebih memungkinkan mereka untuk menyesuaikan alokasi anggaran dengan kondisi yang ada.

Keterbatasan ini juga berdampak pada efektivitas pelayanan publik di Sumatera Barat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pasca-pandemi. Dengan otonomi fiskal yang terbatas, pemerintah daerah tidak sepenuhnya memiliki kendali untuk mengalokasikan sumber daya pada sektor-sektor penting, seperti peningkatan akses layanan kesehatan dan pendidikan di wilayah terpencil. Hal ini, seperti yang diungkapkan dalam hasil penelitian, menyebabkan masih adanya ketimpangan kualitas layanan publik di berbagai wilayah, di mana daerah terpencil dan pedesaan lebih rentan terhadap akses terbatas.

Oleh karena itu, peningkatan kemandirian fiskal di tingkat daerah menjadi penting untuk mencapai tujuan desentralisasi yang lebih efektif. Dengan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan mengurangi ketergantungan pada Dana Perimbangan, Sumatera Barat dapat lebih leluasa dalam mengelola anggaran secara mandiri dan mengoptimalkan pelayanan publik bagi masyarakat. Langkah ini selaras dengan temuan penelitian yang menyarankan pentingnya strategi diversifikasi sumber pendapatan, yang dapat memberi daerah fleksibilitas lebih besar untuk merespons kebutuhan lokal secara cepat dan adaptif

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal memiliki dampak positif terhadap peningkatan aksesibilitas pelayanan publik di Provinsi Sumatera Barat, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan. Namun, meskipun otonomi fiskal telah memberikan keleluasaan bagi pemerintah daerah untuk mengelola pengeluaran sesuai kebutuhan

lokal, hasilnya belum merata di seluruh wilayah. Daerah terpencil masih menghadapi kendala dalam akses terhadap layanan dasar, yang disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur serta sumber daya yang tidak merata. Kondisi ini menekankan bahwa penerapan desentralisasi fiskal masih memerlukan dukungan yang lebih kuat dari aspek kapasitas dan alokasi sumber daya yang tepat.

Dalam hal pengelolaan anggaran, desentralisasi fiskal telah memungkinkan Sumatera Barat untuk menyesuaikan prioritas lokal pasca-pandemi, meskipun sebagian besar anggaran masih terfokus pada kebutuhan operasional. Hambatan ini berkaitan dengan keterbatasan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan ketergantungan yang signifikan pada Dana Perimbangan dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam berinovasi dalam pelayanan publik serta mengurangi fleksibilitas alokasi anggaran yang diperlukan dalam menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.

Dengan kondisi ketergantungan yang tinggi pada dana pusat, desentralisasi fiskal di Sumatera Barat belum sepenuhnya berhasil meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Pemerintah daerah perlu mengembangkan strategi untuk meningkatkan PAD agar dapat lebih fleksibel dalam mengelola anggaran secara mandiri. Dengan demikian, diharapkan pelayanan publik dapat lebih responsif terhadap kebutuhan lokal dan dapat memperkecil ketimpangan dalam penyediaan layanan, terutama di wilayah-wilayah terpencil.

Saran

1. **Peningkatan PAD:** Pemerintah daerah Sumatera Barat perlu mengembangkan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar dapat lebih mandiri secara fiskal. Salah satu caranya adalah dengan mengembangkan potensi ekonomi lokal melalui sektor-sektor unggulan dan mendorong investasi di sektor yang berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
2. **Penguatan Infrastruktur Layanan Publik di Daerah Terpencil:** Pemerintah daerah perlu memperkuat infrastruktur dan fasilitas layanan publik di daerah terpencil untuk mengurangi kesenjangan aksesibilitas. Hal ini dapat dilakukan melalui perencanaan anggaran yang lebih inklusif serta kerjasama dengan pihak swasta untuk mempercepat penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan.
3. **Optimalisasi Alokasi Anggaran pada Pelayanan Publik Utama:** Agar desentralisasi fiskal berdampak lebih efektif, pemerintah daerah perlu memprioritaskan anggaran pada sektor-sektor utama seperti kesehatan dan pendidikan. Upaya ini akan lebih optimal jika diikuti dengan peningkatan efisiensi pengeluaran dan transparansi dalam pengelolaan anggaran.
4. **Pengurangan Ketergantungan pada Dana Perimbangan:** Untuk mengurangi ketergantungan yang tinggi pada dana pusat, Sumatera Barat perlu mengembangkan program-program yang meningkatkan kemandirian fiskal. Pemerintah pusat dapat mendukung upaya ini dengan

memberikan insentif bagi daerah yang berhasil mengurangi ketergantungannya pada Dana Perimbangan serta meningkatkan efisiensi dalam mengelola anggaran secara mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Fitria, A., Weriantoni, W., Saibah, B. R. A. M., & Sufiawan, N. A. (2023). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Di Kabupaten Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2020. *Equilibrium: Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 12(1), 46-53.
- Marya, M., & Handra, H. (2024). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat. *Scientific Journal Of Reflection: Economic, Accounting, Management And Business*, 7(2), 409-418.
- Wijaya, M. (2012). *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Propinsi Sumatera Barat* (Doctoral Dissertation, Universitas Negeri Padang).
- Anisa, F. (2023). *Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Pajak Daerah Dan Jumlah Penduduk Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Barat Periode Tahun 2016-2020* (Doctoral Dissertation, Universitas Andalas).
- Dona, E., Gautama, G., & Muslim, I. (2022). Berpengaruhkah Desentralisasi Fiskal Dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap Akuntabilitas Pelaporan

- Keuangan?. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(12), 4153-4164.
- Purba, M. M., & Iskandar, D. D. (2023). *Analisis Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara* (Doctoral Dissertation, UNDIP: Fakultas Ekonomika Dan Bisnis).
- Putri, H. P., & Ichsan, I. (2024). Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Ekonomi Dan Desentralisasi Fiskal Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Di Provinsi Aceh. *Jurnal Ekonomi Regional Unimal*, 6(2), 1-12.
- Wahyudi, M. R., & Wahyudin, W. (2022, November). Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Di Sulawesi Selatan Tahun 2016–2020. In *Seminar Nasional Official Statistics* (Vol. 2022, No. 1, Pp. 1187-1196).